

Madrasah Mitra: Langkah Strategis Pengembangan Ma- drasah

Muchlis, Nurhattati, Amril
Muhammad, Umul Hidayati

Peneliti Puslitbang Penda dan Keagamaan

Pendahuluan

Memasuki era reformasi, muncul tuntutan dari masyarakat pendukung madrasah untuk mengembalikan madrasah ke ciri awalnya sebagai lembaga pendidikan yang tumbuh dan berkembang dari dan untuk kebutuhan masyarakat. Hal ini sejalan dengan salah satu agenda reformasi pendidikan melalui otonomi pendidikan dan mengembangkan *School Based Management* (SBM).¹ Meskipun sejak diadopsi oleh Departemen Agama, secara kelembagaan posisi madrasah semakin jelas dan terus bertambah jumlahnya,² dari segi kualitas³ dalam beberapa hal mengalami kemunduran dan masyarakat madrasah mera-

sa kehilangan yaitu kemandirian dan karakteristik madrasah sebagai institusi pendidikan Islam dengan corak modern.⁴

Kebijakan pemerintah untuk menerapkan otonomi pendidikan sebagai bagian dari desentralisasi sistem pemerintahan telah memberikan peluang kepada madrasah untuk kembali kepada citra dirinya semula.⁵ Sistem ini pun telah mengubah paradigma pendidikan secara mendasar. Beberapa langkah strategis telah diambil antara lain merevisi kurikulum dengan pendekatan *Kompetensi Dasar*.⁶ Bahkan Ditjen Bagais Departemen Agama RI telah menerbitkan SK tentang pembentukan Majelis Madrasah Khusus untuk Madrasah Negeri.⁷ Ini menunjukkan bahwa Departemen agama d/h Ditjen Bagais telah berusaha merespon semangat reformasi pendidikan.

Dari studi kebijakan yang dilakukan Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan ada dugaan, bahwa sistem sentralisasi telah "memanjakan madrasah".⁸ Akibatnya, untuk melakukan perubahan secara drastis akan menghadapi kendala psikologis maupun teknis.⁹ Hal itu semakin dipersulit oleh kondisi madrasah yang sebagian besar berstatus swasta di mana keterlibatan masyarakat pendukung untuk "menghidupkan" madrasah sangat besar. Dengan kata lain, apapun perubahan yang hendak dilakukan pemerintah terhadap madrasah tidak bisa menghindar dari melibatkan masyarakat pendukung madrasah. Dalam konteks ini, perubahan paradigma pembinaan madrasah membutuhkan kejelasan konsep dan implementasi teknis untuk semua

komponen penyelenggara dan pengelola pendidikan.¹⁰ Artinya, apa yang diinginkan pemerintah dan mudah diterima masyarakat madrasah apabila dilakukan bersama-sama dengan madrasah itu sendiri. Sehingga memberikan keyakinan dan kepercayaan kepada madrasah, bahwa perubahan paradigma pembinaan madrasah tersebut dibutuhkan oleh madrasah.

Dalam konteks seperti di ataslah alasan membentuk kerjasama antara Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan dengan Madrasah menjadi semakin penting. Sebab setiap konsep/draft yang akan dijadikan kebijakan oleh Departemen Agama d/h Ditjen Bagais dirasakan sebagai milik bersama.

Realisasi Kegiatan

A. Persiapan

Untuk mempersiapkan studi rintisan ini, secara konseptual kegiatan dibagi kepada dua aspek, yaitu: teknis administratif dan akademis. Khusus untuk teknis akademis, persiapan yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Menyusun TOR, DO, dan IPD,
2. Melakukan pembahasan TOR, DO dan IPD,
3. Merevisi dan mengadakan TOR, DO dan IPD,
4. Menyusun schedule time,
5. Membuat draft keterlibatan staf dan unsur lain yang diharapkan ikut berpartisipasi.

B. Kajian Awal

1. Tujuan

Tujuan dilakukannya kajian awal ini adalah untuk memperoleh gambaran dan posisi program yang akan dilakukan di antara sekian banyak kegiatan yang dilakukan balitbang agama dan diklat keagamaan. Di samping itu, kajian ini juga akan memposisikan madrasah sebagai institusi yang dibina oleh departemen agama terutama yang terkait dengan mekanisme pengambilan keputusan/ kebijakan.

2. Sasaran

Sasaran pokok atau fokus kajian awal adalah sebagai berikut:

- a. Memahami madrasah secara yuridis dan historis;
- b. Refleksi dari perjalanan madrasah sejak sebelum dan sesudah dibina Departemen Agama;
- c. Potret "politik pemerintah" terhadap madrasah sejak kemerdekaan sampai era reformasi;
- d. Pilihan-pilihan untuk pembinaan madrasah yang sejalan dengan semangat sejarah lahirnya madrasah.

Untuk melakukan kajian seperti tergambar di atas, maka dibentuk sebuah tim yang dipimpin oleh Dr. H.K. Sukardji MM, APU., dengan anggota: Drs. Qowaid, MA, Dra. H. Mardhiyah SA, Drs. H. Syamsuddin, Drs. Muchtamil, Drs. H. Abd. Muin, Drs. H. Soemanto, M.Pd, dan Dra. Ummul Hidayati. Tim ini bekerja dengan memanfaatkan sumber dan literatur, terutama yang dimiliki Balitbang Agama dan Diklat Keagamaan.

3. Hasil Yang Diperoleh

Kegiatan ini dapat diselesaikan selama 10 bulan dan menghasilkan temuan, antara lain sebagai berikut:

- a. Banyak terjadi perubahan kebijakan pemerintah tentang madrasah sejak kemerdekaan sampai era reformasi. Salah satu masalah krusial dan belum menggembirakan pengelola madrasah adalah "politik pendidikan di Indonesia yang belum santun dan ramah terhadap madrasah".
- b. Umumnya madrasah berdiri didukung oleh sebuah komunitas. Budaya berpikir dan sistem sosial yang berkembang di madrasah berakar pada budaya masyarakat dimana ia berdiri.
- c. Secara historis, motivasi dasar lahirnya madrasah di Indonesia adalah "menjadi lembaga pendidikan" bukan menjadi "lembaga keagamaan". Namun atmosfer politik di lingkungan Depdiknas (Depdikbud saat itu) dan "lembaga penentu kebijakan lainnya di tingkat nasional seperti BAPPENAS", selalu berupaya memarginalkan madrasah serta mereduksinya menjadi "lembaga keagamaan".
- d. Keputusan Departemen Agama membentuk Madrasah Negeri sebagai madrasah pembina memiliki relevansi yang kuat. Namun keinginan itu tidak mendapat dukungan yang memadai dari sisi anggaran. Sehingga pertumbuhan Madrasah Negeri pun tidak jauh berbeda dengan Madrasah Swasta.
- e. Melalui dukungan dari pemerintah yang sangat terbatas, madra-

sah tetap berkembang. Salah satu faktornya adalah "kedekatan" madrasah dengan pendukungnya. Namun potensi ini mulai mengalami distorsi sejak tingginya keterlibatan pemerintah dalam membina madrasah, terutama kebijakan yang "serba seragam" antara satu madrasah dengan madrasah lainnya.

- f. Dalam setiap mengambil kebijakan di bidang pendidikan, khususnya madrasah, Departemen Agama kurang didukung oleh hasil kajian yang teruji secara akademik dan lebih banyak mempresentasikan persepsi umum pejabat yang ada di pusat. Sehingga dalam penerapannya ditemukan banyak kendala. Salah satu contoh adalah kebijakan tentang Majelis Madrasah yang melahirkan gejolak di beberapa Madrasah Negeri dan penolakan oleh Madrasah Swasta.
- g. Secara umum kelemahan dari kebijakan apapun yang diambil Departemen Agama untuk madrasah ialah "lemahnya sosialisasi". Sehingga kebijakan yang diharapkan dapat terlaksana secara tepat, malah yang terjadi sebaliknya.

4. Workshop

Hasil kajian awal ini telah dibahas pada tingkat intern Puslitbang Penda dan Keagamaan. Kemudian dijadikan *position paper* pada pembahasan hasil kajian awal dengan lingkup yang lebih luas melalui *workshop* di Wisma YPI Ciawi tanggal 27 s/d 29 September 2002. Untuk mempertajam analisis dan memperkaya data, pada *workshop* ini di-

hadirkan beberapa ahli dan pakar di bidang pendidikan termasuk pejabat struktural yang membina madrasah dan pengelola madrasah di Kabupaten Bandung, Serang, dan Lampung Selatan. Pertemuan ini telah menghasilkan dua dokumen penting, yaitu draft panduan umum *action plan* dan rangkuman pokok-pokok pikiran nara sumber berikut ini:

a. Pokok-pokok Pikiran Nara Sumber

- 1) Pendidikan secara umum dihadapkan pada persoalan *inefficiency*, ketidakcocokan (*mismatch*) antara apa yang dihasilkan sekolah dengan kebutuhan masyarakat, khususnya bagi dunia kerja dan ketidakadilan dalam pelayanan.
- 2) Adalah langkah yang strategis bila arah kebijakan pembangunan nasional di bidang pendidikan diarahkan untuk meningkatkan kualitas lembaga pendidikan.
- 3) Lembaga Pendidikan Agama dan Keagamaan (LPAK) yang memiliki basis masyarakat akar rumput (*grassroot*) telah mengalami perkembangan yang "signifikan". Dan ditentukan oleh pemerintah dibandingkan dengan inisiatif dan kreatifitas masyarakat LPAK sendiri.
- 4) Isu utama otonomi pendidikan adalah adaptasi, antisipasi, dan partisipasi lembaga pendidikan atas segala perubahan yang terjadi dan akan terjadi.
- 5) Gagasan untuk mengembangkan Madrasah Mitra

patut disambut baik dan perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut:

- a) Merumuskan visi yang ingin dibangunnya melalui pengembangan Madrasah Mitra yang diarahkan untuk tersusunnya pola-pola peningkatan kualitas (*Patterns of Quality Improvement*).
- b) Merumuskan misi mengembangkan Madrasah Mitra, yaitu menyiapkan konsep mengenai madrasah yang baik dan menyiapkan perangkat-perangkat intervensi yang terdesain (*designed intervention*).
- c) Dalam mengembangkan Madrasah Mitra, Litbang sebaiknya sejak awal bekerjasama dengan Fakultas Tarbiyah (UIN) dan tidak ditangani sendiri.

b. Draft Panduan Umum Action Plan

1) Umum

- a) Madrasah Mitra adalah suatu bentuk madrasah yang dihasilkan dari kerjasama antara pengelola madrasah dengan Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan dalam rangka mengujicobakan pelbagai konsep kependidikan dan draft kebijakan.
- b) Kerjasama tersebut dituangkan dalam nota kesepahaman (MOU) yang dirumuskan antara pengelola madrasah dengan

- Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan.
- c) Peran strategis Madrasah Mitra karena dapat membentuk hubungan sinergis antara kebijakan yang dihasilkan dengan menggunakan kebijakan tersebut (madrasah).
 - d) Prinsip umum dari Madrasah Mitra ini tidak mengurangi kewenangan dan kreatifitas para penyelenggara pendidikan di madrasah.
- 2) Rasionalisasi Pentingnya Madrasah Mitra
 - a) Terjadinya perubahan paradigma baru pendidikan dari "teachers-centered" menjadi "learners-centered".
 - b) Terjadinya perubahan dan perkembangan tata pemerintahan di Indonesia. Seperti lahirnya UU No. 22 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000.
 - c) Madrasah berada dalam arus utama (*mainstream*) strategi pendidikan nasional.
 - d) Masalah pokok pendidikan di madrasah adalah manajemen kelembagaan, tenaga kependidikan, kurikulum, strategi pembelajaran, kualitas lulusan dan dana/anggaran.
 - e) Berdasarkan ragam permasalahan tersebut di atas, maka perlu dicari dan dirumuskan suatu *pendekatan* penyelenggaraan madrasah, sehingga dapat memperkecil permasalahan di atas.
 - f) Studi Kebijakan Kependidikan di Madrasah yang dilakukan oleh Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan Balitbang Agama dan Diklat Keagamaan merekomendasikan perlunya dirintis pembentukan "Madrasah Mitra".
- 3) Tujuan

Tujuan pedoman umum *action plan* Madrasah Mitra ini adalah untuk memberi arah kepada penyusun *action plan* secara teknis.
 - 4) Konsep/Draft yang Diujicobakan

Adapun konsep kependidikan yang akan diujicobakan adalah:

 - a) Pengembangan budaya sekolah (*school culture*);
 - b) Kurikulum Nasional PAI berbasis kompetensi;
 - c) Standarisasi kompetensi guru PAI;
 - d) Madrasah Mandiri *School Based Management* di madrasah.
 - 5) Prosedur Kerja
 - a) Puslitbang Pendidikan Agama mengajukan beberapa konsep pengembangan madrasah kepada Madrasah Mitra.
 - b) Membahas dan mengkaji secara komprehensif konsep yang terpilih berdasarkan kesepakatan bersama, untuk kemudi-

an merumuskan perencanaan pelaksanaan (strategi pelaksanaan) yang disesuaikan dengan potensi, kondisi, dan kesempatan yang paling memungkinkan.

- c) Pihak penyelenggara madrasah mengaplikasikan uji coba berbagai konsep tersebut.
 - d) Puslitbang Penda dan Keagamaan melakukan supervisi, monitoring, dan evaluasi melalui forum diskusi yang bertempat di Madrasah Mitra sasaran program.
- 6) Unsur-unsur Terkait

- a. Balitbang Agama dan Diklat Keagamaan
 - b. Ditjen Bagais
 - c. Pengurus Yayasan
 - d. Kepala madrasah
 - e. Guru Mata Pelajaran yang diujicobakan
 - f. Orangtua/wali murid
 - g. Kantor Dep. Agama Kab/Kota
 - h. Kanwil Dep. Agama Propinsi
- 7) Tahap Kegiatan
Penjabaran kegiatan dan komponen sesuai dengan tahapan penelitian aksi yang telah digariskan adalah:
- 8) Supervisi, Evaluasi, dan Monitoring

No	Kegiatan	Sasaran	Waktu (bulan)	Hasil
1	Survei Pendahuluan	Adanya kesiapan yang matang dalam penelitian, termasuk pelaksana dan koordinasi		a. Tersusunnya tim pelaksana dengan jumlah dan kualifikasi handal & bertanggung jawab. b. Tersusunnya pedoman pelaksanaan termasuk instrumen survey
2	Survei Lapangan	Responden		Terhimpunnya data dan informasi
3	Perumusan Draft Madrasah Mitra			Tersusunnya draft strategi, mekanisme, dan penerapan Madrasah Mitra.
4	Sosialisasi dan Pelatihan	Di daerah dan pusat		Diperoleh pemahaman yang sama tentang konsep dan teknis pelaksanaan
5	Penerapan Madrasah Mitra			Pelaksana dan pengelola memiliki pengetahuan dan informasi yang utuh tentang teknis pelaksanaan Madrasah Mitra
6	Monitoring	Madrasah terpilih sesuai kriteria uji coba		Berlangsung pengawasan implementasi Madrasah Mitra
7	Evaluasi	Sda.		Merencanakan perbaikan
8	Refleksi	Sda.	3	Melakukan justifikasi, temuan-temuan, dan menyiapkan berbagai data untuk merevisi, memodifikasi memasuki siklus berikutnya.

- a) **Supervisi dan Monitoring**
Kegiatan supervisi dan monitoring untuk melihat secara langsung pelaksanaan kegiatan dengan tujuan untuk mengetahui daya guna, hasil guna, dan tepat guna program. Melalui kegiatan ini dapat diperoleh informasi tentang keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program. Ruang lingkup supervisi meliputi semua aspek program.

Sasaran supervisi meliputi aspek yang terkait dengan manajemen kegiatan, pelaksanaan kegiatan, keberhasilan kegiatan dan upaya pengembangan lebih lanjut. Kegiatan supervisi dilakukan secara langsung oleh Puslitbang Penda dan Keagamaan.

- b) **Evaluasi (Penilaian)**

Kegiatan evaluasi ini dilakukan untuk mengukur hasil yang dicapai dibandingkan dengan sasaran program yang telah ditetapkan sebagai bahan perbaikan pelaksanaan program selanjutnya. Ruang lingkup penilaian ini meliputi semua komponen program, proses, dan pelaksanaan.

Sasaran penilaian mencakup seluruh aspek yang terkait dengan program, manajemen pelaksanaan, pendanaan, sarana dan

prasarana, peserta didik dan pengajar serta dukungan masyarakat setempat.

Teknik penilaian program dilakukan dengan menggunakan: pengamatan, wawancara, dan diskusi dengan memperhatikan prinsip-prinsip penilaian yang menyeluruh.

- c) **Pelaporan**

Pelaporan dilakukan oleh pihak penyelenggara secara tertulis sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan yang dilakukan oleh penyelenggara Madrasah Mitra. Pelaporan ini berdasarkan hasil supervisi dan monitoring serta evaluasi yang telah dilakukan melalui instrumen yang telah dikembangkan.

- c. **Studi Kelayakan**

1. Teknik Pelaksanaan

Sebagaimana yang dipandu dalam desain Rintisan Madrasah Mitra, untuk menentukan madrasah yang siap untuk bekerjasama dilakukan melalui studi kelayakan. Studi ini secara normatif menghendaki dua hal pokok, yaitu desain pelaksanaan dan hasil yang diharapkan. Tahap awal, disusun Desain Operasional dan dibahas sampai disepakati sebagai sebuah dokumen yang akan dijadikan rujukan. Selanjutnya Tim Teknis melanjutkan dengan membuat instrumen melalui proses tersendiri. Setelah instrumen dinyatakan valid, maka Tim Lapangan

berkunjung ke lokasi untuk menjawab beberapa pertanyaan yang sudah disepakati dalam Desain Operasional. Sesuai petunjuk PO Program, karena wilayah yang akan jadi sasaran adalah Serang dan Lampung Selatan, maka dilakukan komunikasi dengan Kandepag masing-masing. Akhirnya disepakati, bahwa di Lampung Selatan akan disurvei 3 madrasah dan di Serang 3 madrasah.

Kegiatan ini dilakukan Tim yang diketuai oleh Drs. H. Mudjahid AK, M.Sc dengan anggota Drs. Dasrizal, Dra. Hj. Mardiyah, Dra. Umul Hidayati, Dr. H. K. Sukardji, MM, APU, H. Maskan Dahlan, S.Sos, H. Ali Umar, Anizar, BA. Di lapangan, tim ini dibantu oleh Tim Lapangan yang diambil dari unsur Kandepag dan Madrasah. Teknis yang dilakukan ialah:

a) Berdialog melalui *forum group dinamic* (FGD)

Pada forum ini hadir unsur Kanwil Agama, Kandepag, Madrasah, orang tua siswa, guru, Majelis Madrasah dan siswa. Kegiatan ini dilakukan di salah satu madrasah yang tercatat untuk survei. Perkembangan pemikiran pada forum ini dicatat oleh Tim Peneliti dan kemudian didiskusikan dengan anggota lainnya yang selanjutnya dijadikan bahan untuk menyusun laporan.

b) Survei ke Madrasah

Survei ke madrasah ini menggunakan IPD yang sudah disiapkan dan dilengkapi dengan form survei yang dibuat sendiri oleh masing-masing tim. Survei ini dimaksudkan untuk melakukan klarifikasi terhadap informasi

yang disampaikan melalui FGD. Sekaligus juga mengamati proses pembelajaran dan fasilitas yang dimiliki madrasah.

c) Penyusunan Laporan

Kegiatan ini adalah kewajiban setiap tim yang bertugas. Laporan ini intinya mencakup hal sebagai berikut:

- i. Potret madrasah yang disurvei
- ii. Respon lingkungan dan civitas madrasah
- iii. Faktor yang mendukung dan menghambat menjadi Madrasah Mitra

Laporan yang dibuat Tim Lapangan di atas dibahas melalui "pertemuan hasil studi kelayakan Madrasah Mitra". Hadir pada pertemuan ini antara lain: Tim Peneliti, Pejabat Struktural di Bagais dan Balitbang serta undangan dari Perguruan Tinggi dan Madrasah. Hasil akhir dari pembahasan hasil studi kelayakan ini adalah "diketahui madrasah yang siap dan bersedia bekerja sama dengan Puslitbang Penda dan Diklat Keagamaan", yaitu Madrasah Ibtidaiyah Negeri I Lampung Selatan dan Madrasah Tsanawiyah Haurgeulis Serang.

2. Hasil Studi Kelayakan

Studi Kelayakan Studi Rintisan Madrasah Mitra yang dilaksanakan pada tahun 2002 merupakan langkah awal kegiatan *Implementasi Pengembangan Madrasah Mitra*. Kegiatan ini dilakukan pada dua lokasi yakni di Kalianda, Lampung Selatan dan Serang, Banten. Adapun yang menjadi sasaran kegiatan ini, untuk masing-masing lokasi terdiri dari

ketiga tingkatan madrasah, dan masing-masing madrasah diwakili dua madrasah yang berstatus negeri. Di Kalianda, Lampung Selatan, madrasah yang menjadi sasaran studi kelayakan terdiri dari lima madrasah. Hal ini disebabkan karena Madrasah Aliyah yang berstatus negeri hanya terdapat satu madrasah. Madrasah-madrasah tersebut antara lain Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) Model Kalianda, Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) Suka Negara, Tanjung Bintang, Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) Kalianda, Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) Valas, Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Kalianda. Sedangkan di Serang, Banten, madrasah yang menjadi sasaran studi kelayakan terdiri dari Madrasah Aliyah Negeri 2 Serang, Madrasah Aliyah Negeri 1 Serang, Madrasah Tsanawiyah Negeri Serang, Madrasah Tsanawiyah Negeri Anyer, Madrasah Ibtidaiyah Negeri Model Cisaat Padarincang Serang, dan Madrasah Ibtidaiyah Negeri Leuwilingung, Kopo Selatan.

Berdasarkan studi kelayakan yang dilakukan di dua lokasi tersebut diperoleh hasil berupa penetapan madrasah yang nantinya akan dilakukan kerjasama pengembangan. Dengan melihat kondisi sebagian madrasah di dua lokasi tersebut, dan melalui diskusi panjang selama sehari, tim studi kelayakan studi rintisan Madrasah Mitra Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan, telah memperoleh gambaran yang jelas mengenai kondisi beberapa madrasah di Kalianda dan Serang. Dari hasil studi kelayakan tersebut, tim pusat berusaha melakukan penilaian, pemilihan dengan menetapkan

kan kriteria tertentu untuk melakukan pemilihan dan menetapkan madrasah mana yang layak dan tepat untuk melakukan uji coba kerjasama pengembangan madrasah. Kriteria penilaian tersebut bukan semata-mata berdasarkan pada kelengkapan fasilitas, sarana prasarana dan SDM yang dimiliki. Tetapi lebih kepada kesungguhan dari masing-masing pengelola madrasah untuk melakukan kerjasama pengembangan. Namun demikian, tidak menutup kemungkinan keberadaan fasilitas dan sarana prasarana yang ada tetap menjadi syarat penilaian.

Ada beberapa kriteria yang menjadi dasar penilaian untuk menetapkan pilihan, antara lain:

- Madrasah yang bersangkutan mengerti, memahami, siap dan bersedia untuk melakukan kerjasama pengembangan.
- Madrasah yang bersangkutan belum pernah menerima program pengembangan yang sama oleh instansi manapun.
- Madrasah yang bersangkutan benar-benar memiliki keinginan untuk meningkatkan mutu pendidikan di sekolahnya.
- Madrasah yang bersangkutan memiliki fasilitas yang memenuhi syarat melaksanakan proses pembelajaran, meskipun dalam kondisi kurang memadai.
- Lingkungan madrasah kondusif untuk melakukan pengembangan.

Berdasarkan kriteria-kriteria tersebut, telah ditetapkan madrasah yang akan menjadi sasaran program kerjasama pengembangan di daerah, yaitu:

a) Kalianda Lampung Selatan:

- Madrasah Ibtidaiyah Negeri Sukanegara, Tanjung Bintang
- Madrasah Tsanawiyah Negeri Valas
- Madrasah Aliyah Negeri Kalianda

b) Kabupaten Serang:

- Madrasah Ibtidaiyah Negeri Leuwintang Kopo, Serang
- Madrasah Tsanawiyah Negeri I Anyer
- Madrasah Aliyah Negeri I Serang

Selanjutnya program pengembangan Madrasah Mitra akan masuk pada tahap implementasi.

¹Usul ini berawal dari evaluasi yang dilakukan Bank Dunia tentang pendidikan di Indonesia pada masa krisis. Salah satu usul dan rekomendasi dari evaluasi tersebut adalah perlunya ditingkatkan partisipasi masyarakat di bidang pendidikan. Sistem yang ditawarkan adalah *School Based Management*. Lihat, Bappenas-Ditjen Dikdasmen, *School Based Management Pendidikan Dasar* Jakarta 2001, h. 17. Terkait dengan hal tersebut, Departemen Agama telah menerbitkan SK Dirjen Bagais Tahun 2001 tentang pembentukan Majelis Madrasah.

² Hal itu dapat dilihat pada statistik madrasah yang diterbitkan EMIS Binbaga Islam dari tahun 1995 s/d 2000 yang memperlihatkan adanya kenaikan jumlah madrasah yang signifikan antara 7 - 10% pertahun.

³ Ukuran yang digunakan adalah NEM yang diperoleh siswa madrasah secara umum jauh di bawah sekolah umum. Untuk tingkat nasional, tidak satupun madrasah yang masuk nomor 1 s/d 50.

⁴ Madrasah lahir sebagai reaksi atas kebijakan Belanda tentang pendidikan dan

model pendidikan yang dilaksanakan di Surau dan Pondok Pesantren, Lihat, K.A. Steenbrink, op.cit, h.124.

⁵ Otonomi pendidikan diatur melalui PP 25 Tahun 2000 dengan membagi kewenangan kepada pusat dan daerah otonom (Kabupaten).

⁶ Naskah ini telah disiapkan Balitbang Agama tahun anggaran 2001, yaitu Pedoman Perencanaan dan Evaluasi Madrasah, Pengembangan Ciri Khas Madrasah, Kompetensi Dasar Guru, Pembiayaan Madrasah, Standarisasi Sarana dan Materi Pembelajaran.

⁷ Langkah ini sebagai antisipasi untuk memberlakukan otonomi madrasah sebagai tahap akhir dari otonomi pendidikan.

⁸ Dari distribusi dana yang digunakan Departemen Agama untuk pendidikan, porsi terbesar (sekitar 70%) yang menikmati adalah Madrasah Negeri (MIN, MTsN, dan MAN dengan jumlah sekitar 17%). Bahkan 80% dana pendidikan untuk Madrasah Negeri dikonsentrasikan untuk mendampingi dana bantuan luar negeri yang fokus perhatiannya adalah Madrasah Model. Sedangkan untuk swasta (sekitar 83 dari jumlah madrasah) menerima bantuan relatif kecil (sekitar 30% dari alokasi dana pendidikan yang dimiliki Depag RI). Lihat, Dasrizal "Pedoman Program Peningkatan Kualitas Pendidikan Agama", Jakarta, Balitbang Agama, 2000, Dokumen Proyek, h.4.

⁹ Kendala pembinaan terhadap Madrasah Negeri antara lain "kebiasaan madrasah" menerima sesuatu yang sudah jadi dari pusat, inisiatif rendah dan kurang diberi peluang oleh manajemen pembinaan yang dikembangkan Departemen Agama untuk berkembang. Untuk lebih lengkap dapat dilihat, Dr. HK. Sukardji, APU, *Manajemen Pendidikan Islam dan Peranannya dalam Pencapaian Tujuan Pendidikan Nasional (Studi Tentang 4 Madrasah Aliyah Negeri di Jakarta)*, Tesis Doktor (belum diterbitkan) IAIN Jakarta, 2000.

¹⁰ Aspek pendidikan yaitu Kurikulum, Ketenagaan, Sarana, Kesiswaan, Lingkungan dan Pengembangan.